



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Formulir
RKAP-SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA

Organisasi : 4.06.03.02 Biro Hukum

Program : 4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Kegiatan : 4.06.4.06.03.17.0038 Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum

Lokasi Kegiatan : KOTA SEMARANG;Biro Hukum

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 820.039.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 1.836.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)

Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan APBD : Dalam rangka mendukung program penanganan pencegahan pandemi Covid-19

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	-Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	-Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	-91.00 %	-91.00 %
	- Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	- Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	- 91.00 %	- 91.00 %
	- Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	- Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	- 91.00 %	- 91.00 %
	- Persentase kabupaten/kota peduli HAM	- Persentase kabupaten/kota peduli HAM	- 91.00 %	- 91.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 1.550.000.000,-	Rp. 820.039.000,-
Keluaran	-Penanganan sengketa hukum	-Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	-5.00 Sengketa	-48 Perkara
	- Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN	- Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN	- 9.00 Perkara	- 12 Perkara
	- Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	- Penanganan sengketa hukum	- 190.00 Perkara	- 5.00 Sengketa

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja					
	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Hasil	-Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum		-Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum			-91.00 %			-91.00 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Hukum, 35 Kabupaten/Kota, Provinsi lain, Instansi Pusat dan Masyarakat											
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.	BELANJA				1.550.000.000				820.039.000	(729.961.000)	(47,09)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.550.000.000				820.039.000	(729.961.000)	(47,09)
5.2.1.	Belanja Pegawai				360.300.000				245.300.000	(115.000.000)	(31,92)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				360.300.000				245.300.000	(115.000.000)	(31,92)
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				359.400.000				245.300.000	(114.100.000)	(31,75)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				900.000				0	(900.000)	(100,00)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				1.189.700.000				574.739.000	(614.961.000)	(51,69)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				27.220.000				4.002.000	(23.218.000)	(85,30)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				16.420.000				1.602.000	(14.818.000)	(90,24)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				3.600.000				2.400.000	(1.200.000)	(33,33)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				7.200.000				0	(7.200.000)	(100,00)
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				586.600.000				150.400.000	(436.200.000)	(74,36)
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli				498.000.000				121.000.000	(377.000.000)	(75,70)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.2.2.03.35.	Belanja Perkara Hukum				88.600.000				29.400.000	(59.200.000)	(66,82)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				6.723.000				4.032.000	(2.691.000)	(40,03)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				6.723.000				4.032.000	(2.691.000)	(40,03)
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				97.200.000				0	(97.200.000)	(100,00)
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Hotel				97.200.000				0	(97.200.000)	(100,00)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				104.000.000				45.000.000	(59.000.000)	(56,73)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				104.000.000				45.000.000	(59.000.000)	(56,73)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				367.957.000				371.305.000	3.348.000	0,91
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				234.187.000				339.874.000	105.687.000	45,13
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				133.770.000				31.431.000	(102.339.000)	(76,50)
Jumlah					1.550.000.000				820.039.000	(729.961.000)	(47,09)

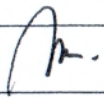
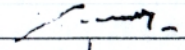
Catatan :

Semarang, 28 Agustus 2020
 KEPALA BIRO HUKUM
 PROVINSI JAWA TENGAH

 IWANUDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
 NIP. 197112071995031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya	

2.	WISNOE DJAYA WARDHANA, SE	196706171995031002	Kasubbid Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.	ELYTA VERY WIJAYA, S.IP	198204082011012004		
4.	DWianto PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran	
5.	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
6.	FARADINA KRISLIANITA, S.H	199309062019022009	Analisis Keuangan Pusat Daerah	